



Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Jawiah ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 3, Desember 2021
sjawiah7@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Jawiah, S. (2021). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 87-98.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Hasil Penelitian diantaranya yaitu pertama, Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat secara umum sudah memberikan perubahan dan pembangunan serta pelatihan kepada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaannya sudah baik. Kedua, Adapun peranan Kepala Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang Kepala Desa dalam ketiga kategori tadi, namun di bagian perencanaan mendapat sedikit hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan program yaitu seperti hujan, kerusakan alat berat dan sedikit tenaga kerja yang menjadi kendala utama seperti pembuatan jalan tani dan drainase.

Kata Kunci: Kepala Desa, Masyarakat, Pemberdayaan

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the village head in community empowerment in the village and to find out what factors influenced the role of the village head in community empowerment in Teteinea Village, Lalembuu District, South Konawe Regency. The data analysis technique used in this research is descriptive-qualitative, ie all data obtained in the field are collected and then conclusions are drawn based on the answers that are relevant to the problems in this study. The results of the research include, first, the role of the village head in community empowerment in general has provided changes and development and training to the community according to the demands of their work is good. Second, the role of the Village Head in planning, implementation and overall supervision is stated to have an active role as a Village Head in the three categories, but in the planning section there are a few obstacles due to the lack of community participation to participate in the socialization of the program to be implemented. Then the problems faced by the Village Head in implementing the program, such as rain, damage to heavy equipment and a small number of workers were the main obstacles such as making farm roads and drainage.

Keywords: Village Head, Community, Empowerment

A. Pendahuluan

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang - Undang nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau juga sering di artikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang tela di jelaskan dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Desa Teteinea merupakan salah satu desa di Wilayah Kecamatan Lalembuu kabupaten Konawe Selatan. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, karena berdasarkan apa yang dilihat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu, tingkat kreativitas dan daya saing masyarakat desa Teteinea dalam mengelola ekonominya masih rendah.

Berdasarkan uraian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Mengingat jumlah populasi relatif banyak, maka diadakan penarikan sampel dengan memilih secara acak sebanyak 30 responden dari 3 Dusun yang ada di Desa Teteinea.

Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

- a. Studi Kepustakaan (library research), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (Field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode :
 - Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
 - Interview (wawancara), yaitu melakukan wawancara dengan responden maupun informan kunci guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar panduan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Teteinea merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun luas wilayahnya 565 hektar.

Secara administratif Desa Teteinea merupakan wilayah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dengan letak geografis sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamukti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambadia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapuwila

Keadaan alam Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas daratan yang subur dan cocok untuk potensi perkebunan saat ini, aktifitas masyarakat dalam bertani semakin meningkat seiring dengan maksimalnya pemanfaatan areal perkebunan.

Sebagaimana iklim yang berlaku pada umumnya di Indonesia, Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan sama persis memiliki musim yang sama yakni musim hujan yang berlangsung sekitar Januari sampai Juni dengan cerah hujan sedang, pada bulan Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau.

Jumlah Penduduk Berdasarkan hasil penelitian dari data yang ada bahwa untuk saat ini jumlah penduduk yang ada di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu berjumlah 262 Kepala Keluarga atau dapat mencapai 1.048 jiwa. Dengan rincian laki-laki 542 orang dan perempuan mencapai 506 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Teteinea

NO	Jenis Kelamin	Jlh Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	350	49,09
2	Perempuan	363	50,01
Jumlah		713	100,00

Sumber data ; Kantor Kepala Desa Teteinea, Juni 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk Desa Teteinea yang berjumlah 713 jiwa yang menduduki porsi terbanyak adalah penduduk yang berjenis kelamin Perempuan yakni mencapai 363 jiwa atau 50,01 %, sedangkan selebihnya yaitu 350 jiwa atau 49,09 % adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki.

Penduduk Desa Teteinea pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 713 jiwa yang tingkat pendidikan memiliki sebaran mulai dari belum/tidak pernah sekolah, SD/tamat SD, SLTP/tamat SLTP, SLTA/Tamat SLTA, dan pada tingkatan Perguruan Tinggi. Sebaran tingkat pendidikan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Kelompok Umur	Jumlah	Persen
Belum/tidak pernah sekolah	122	31,14
SD/Tamat SD	251	35,20
SLTP/Tamat SLTP	112	15,71
SLTA/Tamat SLTA	107	15,01
Perguruan Tinggi :	-	-
Diploma	-	-
Sarjana Muda	7	0,98
Sarjana	14	1,96
Magister	-	-
Jumlah	713	100,00

Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea, Juli 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk desa Teteinea yang belum/tidak pernah sekolah mencapai 31,14 persen. Kemudian yang sedang mengikuti pendidikan di SD dan tamat SD sebanyak 35,20. persen. Selanjutnya, SLTP dan tamat SLTP sebanyak 15,01 persen sampai yang terkecil yakni yang berpendidikan Sarjana sebanyak 1,96 persen.

Selanjutnya, Mata pencaharian penduduk desa Teteinea menunjukkan bahwa dari 315 Kepala Keluarga penduduk Desa Teteinea sebagian besar adalah petani, baik sebagai petani sawah maupun sebagai pekebun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan untuk jenis pekerjaan tersebut cukup luas. Mata pencaharian lain yang ditekuni penduduk desa Teteinea adalah berdagang, Pegawai baik itu sebagai pegawai negeri maupun sebagai pegawai swasta. Sebaran penduduk menurut jenis mata pencaharian di desa Teteinea disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Mata pencaharian

Jenis Mata pencaharian	Frekuensi	Jumlah
Petani	225	71,43
Dagang	38	12,06
PNS	12	3,81
Pegawai Swata	13	4,13
Pensiun	-	-
Pertukangan	27	8,57
Jumlah	315	100,0

Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea, Juli 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 71,43 persen dari jumlah Kepala Keluarga penduduk desa Teteinea bekerja pada jenis mata pencaharian sebagai petani dan merupakan kelompok terbesar. Demikian juga dengan pekerjaan sebagai Pedagang relatif jumlahnya juga besar mencapai 12,06 persen. Sementara penduduk yang bermata pencaharian pada jenis lainnya jumlahnya di bawah 4,0 . persen.

Untuk mengetahui letak / jarak Desa Wadonggo. maka dapat dilihat data berikut ini yakni jarak dan waktu tempuh dari Balai/Kantor Desa dengan pusat – pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak ke Ibu kota Kecamatan 7,0 Km
2. Jarak ke Ibu kota Kabupaten 17,,0 Km
3. Jarak ke Ibu kota Propinsi 87 Km

4. Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 15,0 menit
- 5 Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 60,0 menit
6. Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 180,0 menit

Tabel 4. Susunan Pemerintah Desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Muh. Sabri
2	Sekretaris Desa	Supriadi
3	Bendahara	Sitti Nurbaya
4	Kasi Umum	Suriansyah
5	Kasi Administrasi	Samdiana
6	Kaur Pemerintahan	Andi Ansar
7	Kaur Kesejahteraan	Basriadi
8.	Kaur Pemberdayaan	Fitriadi

Sumber : Kantor Kepala Desa Teteinea, Juli 2019

Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pemberdayaan

Sebelum melaksanakan pogram pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Kepala Desa selalunya melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan hal apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan yang semakin membaik. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kepala Desa selalu memantau bagaimana keadaan masyarakat dan pembangunan yang ada serta kendala/permasalahan yang dirasakan masyarakat agar bisa dicarikan solusinya.

Dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat, salah satu cara yang sangat membantu masyarakat adalah melalui program pembangunan. Dalam menjalankan program tentulah ada peninjauan dan perencanaan. Pada tahap perencana ini harus melalui beberapa tahap untuk mendapatkan program yang akan dilaksanakan, adapun tahap dalam perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh desa sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang informan Samdiana bahwa:

“Program yang akan dilaksanakan oleh desa melalui 3 tahap yaitu pertam, musyawarah antara kepala dusun dengan warganya, kedua musyawarah aparat desa/pemerintah desa dan yang ketiga sosialisasi/musyawah apart desa dengan masyarakat, melalui musyawarah inilah program desa ditentukan dan dilaksanakan sesuai keputusan bersama.”(wawancara, 2 Juni 2019)

Pada tahapan pertama yakni musyawarah/sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing kepala dusundengan warga di lingkungannya untuk mengumpulkan program yang diusulkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat dan diharapkan bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama, setelah program yang diusulkan oleh kepala dusun selanjutnya akan di musyawarahkan kembali melalui rapat/musyawah antara aparat desa. Dalam musyawarah ini, masing-masing kepala dusun menyuarakan program yang diusulkan oleh masyarakat, tidak hanya kepala dusun Kepala Desa juga ikut andil dalam memberikan usulan mengenai program yang ingin dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan langsung beliau di lapangan. Hal ini dipertegas dengan pengamatan langsung oleh peneliti, bahwa memang ada program yang direncanakan langsung oleh Kepala Desa dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan bersama aparat desa mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan program tersebut, sekaligus mendengarkan keluhan masyarakat melalui wakilnya dan untuk program dari tiap dinas kabupaten akan dibahas pula melalui musyawarah tersebut dalm upaya pemberdayaan masyarakat.

Setelah program yang diusulkan telah terkumpul, maka dilihat mana program yang harus disegerakan pelaksanaannya dan program apa yang akan dilaksanakan selanjutnya dengan melihat pertimbangan dana dan banyaknya permintaan masyarakat terkait program itu. Dalam rapat antara aparat desa tadi, maka akan ditetapkan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi/musyawah terakhir oleh aparat desa dengan masyarakat untuk menentukan tempat pelaksanaan program tersebut. Penetapan lokasi pelaksanaan program ini sesuai dengan penuturan seorang informan Bapak Andi Ansar bahwa:

“Program yang hendak dilaksanakan di laksanakan, penetapan lokasinya berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang menghadiri musyawarah tersebut, sehingga sangat diharapkan untuk kedatangan masyarakat agar program yang mereka usulkan sebelumnya

bisa terealisasi sesuai tempat yang diinginkan bersama, meskipun hanya sebagian masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut.” (wawancara, 2 Juni 2019 }.

Sehingga dalam hal penetapan lokasi ini sangat diharapkan semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut agar sama-sama mengetahui program yang akan dilaksanakan di desa dan tidak adanya rasa keberpihak dalam menentukan program serta lokasinya sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan bersama.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Teteinea meliputi pembangunan fisik seperti pembuatan jembatan, pembuatan drainase, perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan jalan usaha tani, pengadaan usaha sewa tenda besi, dan penyediaan bibit pala. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pelatihan pengurus karang taruna, pelatihan kelompok tani, dan honor guru non pns (Guru TK).

Mata pencaharian masyarakat Teteinea mencapai 90% sebagai petani dan mayoritas hanya sampai tamatan SMA, oleh karena itu Kepala Desa selalu memberikan motivasi berupa dorongan kepada para pemuda dan pelajar di desanya untuk selalu bersemangat dan tetap melanjutkan sekolahnya hingga sampai lulus di bangku kuliah dan diharapkan pula kepada para orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak mereka untuk melanjutkan bersekolah, agar anak mereka kelak tidak hidup susah seperti yang dialami orang tuanya, di mana setiap hari dari pagi hingga sore mereka harus pergi ke kebun agar bisa melanjutkan kehidupan yang baik.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang berkaitan dengan peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, bisa dikatakan bahwa peranan Kepala Desa telah memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan desa baik di bidang pembangunan desa maupun ekonomi masyarakatnya serta usaha beliau dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang begitu perhatian. Sebagaimana hasil wawancara dari seorang informan, Bapak Ahmad Sahlan bahwa:

“Kepala Desa merupakan sosok seorang pemimpin yang memiliki jiwa membangun yang tinggi, beliau selalu berusaha melakukan pembangunan desa meskipun terkadang harus dengan biaya pribadi, untuk pembangunan desa ini, terbukti jika kita membandingkan dengan desa yang lain, desa kami ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik, seperti pembangunan balai, jalan tani dan drainase yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan desa”. (wawancara, 2 Juni 2019)

Hal ini bisa terjadi karena lemahnya atau kurangnya motivasi dari Kepala Desa maupun orang tua kepada para pelajar agar sadar akan pentingnya pendidikan karena melalui kemampuan ilmu yang mereka dapatkan/tepuh di bangku sekolah mampu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kualitas SDM semakin baik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan penuturan dari informan salah seorang tokoh masyarakat, yakni Bapak H. Ahmad bahwa:

“Kepala Desa masih harus lebih meningkatkan memberikan motivasi secara langsung yang berkaitan dengan pendidikan, karena mungkin faktor yang menghambatnya yakni kondisi wilayah yang luas dan masyarakat yang jarang ditemui karena kesibukan masyarakat di kebun sepanjang harinya, sementara malam digunakan untuk waktu istirahat, sehingga tidak ada waktu untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa, kecuali hanya urusan penting saja”. (wawancara, 3 Juni 2019)

Peranan Kepala Desa Dalam meningkatkan pembangunan desa sebagai usaha dalam pemberdayaan masyarakatnya, beliau selalunya meninjau lokasi dan menyiapkan beberapa program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembangunan fisik. Agar program ini dapat terealisasi dengan baik dibutuhkan kerja sama yang baik dengan aparatur desa dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Dalam pembangunan non-fisik sangat penting juga untuk diperhatikan karena berpengaruh juga dengan kesejahteraan masyarakat meskipun kenyataannya masih banyak pemuda bahkan orang tua yang masih mengkonsumsi miras. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, memang masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi miras dan tidak ada larangan langsung dari kepala desa itu sendiri sedangkan dalam upaya pembangunan tetap masih melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang diadakan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa Teteinea berupaya mengaktifkan program-program penunjang dalam pemberdayaan masyarakat non-fisik seperti PKK, Karang Taruna dan Pelatihan Kelompok Tani. Kepala Desa dibantu aparat desa melakukan pembangunan yang berkelanjutan seperti pembangunan drainase yang telah dilakukan sejak 2018 dan akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, pembuatan jalan usaha tani dan masih banyak lagi hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan, di mana dalam proses pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana penuturan dari salah seorang informan penelitian, Ibu Suhada menyatakan bahwa:

“Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kami masyarakat diarahkan oleh Kepala Desa untuk ikut serta mengambil andil dalam kegiatan tersebut dan jika ada proyek dalam desa maka yang dilibatkan sebagai pekerja diambil dari masyarakat setempat, salah satu contohnya pembuatan drainase pada tahun lalu semua pekerja adalah masyarakat di sini”. (wawancara, 2 Juni 2019)

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Teteinea dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan namun dalam pengambilan keputusan hanya disepakati oleh Kepala Desa dan aparat desa sebagai wakil dari masyarakat tanpa melakukan sosialisasi langsung antara Kepala Desa dan masyarakat.

Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan

Usaha untuk menggalakkan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa, maka akan melibatkan beberapa pihak yakni Kepala Desa, aparat desa dan masyarakat setempat. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah desa masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Padahal kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan seorang pemimpin atau Kepala Desa.

Dari pengamatan langsung oleh peneliti berkaitan dengan peranan Kepala Desa terhadap masyarakatnya, bisa dikatakan telah ada dorongan dan motivasi kepada masyarakatnya meskipun tidak banyak yang berpartisipasi dalam rapat yang bertujuan agar masyarakat giat bekerja, membangun desa, dan ikut andil dalam pelaksanaan program desa yang semuanya itu sangat berkaitan erat dengan usaha untuk memberdayakan masyarakat.

Sebagaimana penuturan dari salah seorang informan penelitian, Bapak Muh. Nur menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa selalu memberikan motivasi kepada warganya untuk selalu giat bekerja, melaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian untuk meningkatkan SDM warganya, meningkatkan usaha dalam bidang tertentu seperti kios dan dalam bidang ternak pun desa memberikan bantuan berupa sapi ternak, ini semua dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (wawancara, 3 Juni 2019).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa beserta aparatnya berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan di mana tahun sebelumnya sudah mampu membangun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakatnya dan dengan terlaksananya program yang direncanakan ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan penelitian Bapak Abd. Samad. bahwa:

“Kami sangat puas dengan peran kepala dalam pembangunan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat di sini yang dilakukan oleh Kepala Desa selama masa jabatannya, karena jika melihat kondisi desa yang dulu dengan yang sekarang sudah berubah lebih baik, artinya pembangunan di desa kami ini sudah baik dibandingkan dengan desa yang lain pada Kecamatan Lalembuu”.(wawancara, 4 Juni 2019)

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan, Kepala Desa beserta aparat desa terkhusus dari LPM bersamasama melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Teteinea agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu,

Kepala Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakatnya melalui program pemberdayaan.

Adapun bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat seperti penyediaan bibit pala dan bedah rumah tidak layak huni. Tidak hanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dalam bidang pembangunan dan sosial Kepala Desa juga membangun sarana dan prasarana seperti jembatan dan jalan usaha tani sedangkan di bidang sosial, Kepala Desa membuat program untuk kaum perempuan yaitu PKK dan untuk para pemudanya dilibatkan dalam Karang Taruna desa, kesemuanya ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakatnya agar lebih baik.

Hal ini dipertegas dengan pengamatan peneliti bahwa Kepala Desa langsung meninjau lokasi atau melihat keadaan rumah yang layak untuk diberikan bantuan dan aktif dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Dalam perkembangan program yang dilaksanakan ini, pihak masyarakat yang secara langsung mengerjakan semua program yang ada yang sebelumnya telah direncanakan, namun ada juga yang mereka keluhkan terkait upah kerja yang sedikit, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau ikut bekerja. Hal ini mengakibatkan kurangnya pekerja, terlebih lagi ada kendala yang lain seperti bahan material yang terlambat, karena mobil pengangkut dibatasi oleh Kepala Desa sendiri dan cuaca apabila hujan bisa menjadi penghambat yang nyata dan pekerjaan akan terhenti.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan seorang informan Bapak H. Lukman, bahwa:

“Kendala Kepala Desa dalam pelaksanaan program desa salah satunya karena kurangnya masyarakat yang berminat untuk mau bekerja dikarenakan gaji pekerja yang sedikit jika dibandingkan dengan upah pekerja di desa tetangga, terlebih lagi ketika hujan maka masyarakat yang bekerja tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka.” (wawancara, 4 Juni 2019)

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu memperbaiki keadaan masyarakat agar lebih baik sebagai usaha Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakatnya, untuk program pembangunan itu sendiri merupakan tahap lanjutan dari program perencanaan pada tahun 2018 lalu. Untuk program lain seperti pembuatan kelompok tani, mereka sudah berusaha mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian daerah setempat untuk mendapatkan anggaran dalam mengembangkan usaha pertanian mereka, namun belum ada juga tindak lanjut dari dinas pertanian setempat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan penelitian Bapak Armani menyatakan:

“Di dusun kami yakni dusun II telah lama membuat kelompok tani dan sudah menyerahkan proposal kepada dinas di mana proposal kami ini telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak dinas pertanian untuk memberikan bantuan kepada kami, padahal kami sebagai masyarakat petani tentu sangat mengharapkan bantuan tersebut baik berupa modal usaha ataupun penyediaan bibit tanaman.” (wawancara, 4 Juni 2019)

Sebagai seorang Kepala Desa tidaklah harus berpangku tangan hanya pada dana pemerintah pusat saja, dengan usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya, Kepala Desa harus berpikir kreatif sebagaimana yang dilakukannya, beliau membuat tenda besi sebagai badan usaha milik desa dan dengan usaha ini pemasukan ke kas desa semakin bertambah sehingga jika ada warga yang membutuhkan bantuan maka bisa diatasi dengan penghasilan desa tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sebelumnya memang telah berhasil dan program pemberdayaan tahun ini untuk dilaksanakan sedang menunggu dana desa agar mampu diselenggarakan baik program yang baru maupun program sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Teteinea merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya serta ada program tambahan, adapun program saat ini belum terlaksana dengan baik karena masih terkendala dengan dana. Namun untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pihak pemerintah desa membuat program lain seperti program sosial dan badan usaha milik desa.

Peranan Kepala Desa Dalam Mengawasi Pemberdayaan Masyarakat

Dengan dilakukannya perencanaan serta perencanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, diharapkan Kepala Desa bersama masyarakat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat baik sebagai pengelola dan pelaksanaan maupun dalam pengawasan kegiatan program tersebut, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam pengawasan program yang sedang dilaksanakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan tim yang seharusnya mengontrol dan mengawasi jalannya program mulai dari pelaksanaan sampai pengawasan sementara Kepala Desa sebagai penanggung jawabnya, namun yang terjadi di lapangan TPK tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya di mana seharusnya sebagai tim pengawas digantikan langsung oleh Kepala Desa untuk mengawasi jalannya program. Hal ini dikarenakan kinerja dari TPK itu sendiri kurang bagus sebagai kontrol dan pengawas suatu program, apalagi yang dikhawatirkan Kepala Desa jika ada kesalahan dalam pelaksanaan program karena sebagai penanggung jawab akan diminta pertanggung jawaban oleh pihak pemerintah kabupaten.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan informan Bapak Syahrudin yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya yang mengatur semua program desa adalah tim pengelola kegiatan, baik mulai dari pelaksanaannya seperti penyediaan bahan/material untuk kegiatan, transportasi dan dana kegiatan sampai pada pengawasannya pun menjadi kendali dari pihak TPK, Kepala Desa hanya sebagai penanggung jawab, namun karena TPK kurang maksimal dalam bekerja sehingga Kepala Desa sendiri yang mengambil alih semua kegiatan TPK terlebih lagi beliau adalah penanggung jawab dari semua program yang sedang dilaksanakan”. (wawancara 4 Juni 2019)

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tahap ini sangat penting sekali untuk mengarahkan/memandu program yang akan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada musyawarah bersama. Hal ini dapat diketahui bagaimana peran Kepala Desa dalam mengawasi program yang akan dilaksanakan melalui salah satu informan penelitian Bapak Abd. Halim menuturkan bahwa:

“Setiap ada kegiatan/program yang dilaksanakan oleh desa, Kepala Desa selalu melakukan Pengawasan kepada bawahannya selaku penanggung jawab suatu program yang sedang dilaksanakan untuk menanyakan kemajuan/kelancaran dari program tersebut. Contohnya seperti pembangunan jembatan yang sedang saya tangani ini, Kepala Desa terus menanyakan bagaimana perkembangan atau adakah kendala dengan proyek yang saya akan kerjakan ini”. (wawancara, 4 Juni 2019)

Pengakuan tersebut dipertegas dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa bila ada program yang sedang dikerjakan Kepala Desa meninjau langsung lokasi pekerjaan dan selalu dibantu oleh aparat desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan serta hasil dari program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara informan penelitian mengatakan ada koordinasi dari Kepala Desa. Hal ini diakui karena setiap bulannya diadakan rapat evaluasi kinerja tiap aparat desa dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang telah didapatkan. Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses pelaksanaan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi mengenai program yang akan dan sedang dilaksanakan.

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan program perencanaan dan bentuk pembangunan agar kerusakan atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan bisa diminimalisir. Pengawasan adalah patokan atau ukuran untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah segi guna dan hasil guna pelaksanaan pekerjaan. Di lain pihak, Kepala Desa sebagai pengawas juga dimaksudkan untuk membuat kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya pengawasan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan dan bidang sosial, Kepala Desa juga antusias untuk mengembangkan program sosial yang ada di desa seperti program PKK dan Karang Taruna yang terus diusahakan agar senantiasa aktif guna memperbaiki hubungan masyarakatnya, baik dari kalangan sesama orang tua maupun dari kalangan pemuda.

Di bidang kesehatan, Kepala Desa tidak berdiam diri saja, beliau melakukan upaya untuk selalu memperhatikan kesehatan masyarakatnya melalui berbagai program kesehatan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan penelitian Bapak Ruslan Ridwan ketua Karang Taruna bahwa:

“Selama ini Kepala Desa selalu memberikan pengawasan dan kontrol yang baik berkaitan dengan program sosial, beliau memberikan dukungan kepada muda-mudi di desa kami seperti membuat lapangan sepak bola bagi laki-laki, dan untuk ibu-ibu bergerak di bidang PKK, bahkan di bidang 59 pendidikan pun Kepala Desa memberikan sumbangsi dengan mendirikan TK Swasta dengan memakai guru honorer sebagai tenaga pengajarnya yang dibiayai oleh dana desa”. (wawancara, 5 Juni 2019)

Dari penjelasan di atas dan pernyataan dari beberapa informan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak pelaksana secara langsung di lapangan sehingga bisa dinilai perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan yang diharapkan agar sesuai dengan apa yang direncanakan dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan sehingga bisa mendapatkan hasil kerja yang dapat berguna bagi masyarakat.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa pasti akan menghadapi rintangan dan harus berupaya mencari solusi/jalan keluar dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas 2 faktor yaitu:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, menunjukkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Kewibawaan dalam memimpin, Kepala Desa adalah sosok pemimpin yang tegas disiplin dan dekat dengan masyarakatnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan peduli terhadap masyarakat tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh di mata masyarakatnya sehingga dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa hal ini sangat berpengaruh. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian Bapak Muslimin R menyatakan bahwa:

“Beliau adalah pemimpin yang tegas, disiplin dan peduli dengan masyarakat, sehingga ketika beliau memberikan arahan atau perintah kepada aparatnya, maka dengan senang hati kami bersegera untuk melaksanakan perintah beliau dan ketika ada masyarakat yang meminta solusi dari permasalahan yang dihadapi, beliau dengan senang hati akan membantu masyarakatnya. (wawancara, 5 Juni 2019)

- b. Kekuasaan, dengan kekuasaan yang dipegang oleh Kepala Desa, beliau mampu memberikan pengaruh dan menggerakkan serta bisa memberi instruksi langsung kepada aparatur desa agar melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan dan bisa dilaksanakan secepatnya di mana hal ini untuk mencapai tujuan bersama sebagai perwujudan peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian Bapak Ahmad Yani menyatakan bahwa:

“Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa, beliau lebih mudah memberikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas secepatnya dan dengan mudahnya beliau memanggil bawahannya/aparat desa ke rumahnya untuk mengerjakan tugas yang ada, serta kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa memudahkan beliau mengontrol kinerja para aparat desa”. (wawancara, 5 Juni 2019)

- c. Keturunan, masyarakat di Desa Teteinea sendiri masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma serta adat yang sifatnya turun temurun yang ada dalam masyarakat yang bersifat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pula dari pemimpin yang memiliki keturunan yang baik sehingga tidak diragukan lagi dalam memimpin. Dari hasil wawancara kepada seorang informan penelitian yaitu Ibu Nurmaida menyatakan bahwa:

“Kepala Desa kami adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik, dihormati dan dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Dalam keluarga beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sehingga masyarakat tidak takut akan tindakan KKN dari Kepala Desa itu sendiri dan tidak hanya nilai kejujuran yang diterapkan, tetapi nilai-nilai kebaikan yang lain seperti kedisiplinan dan kesopanan sangat ditekankan dalam keluarga beliau”. (wawancara, 5 Juni 2019)

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, menunjukkan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Kondisi penduduk yang majemuk dan jalan yang rusak menjadi kesulitan bagi Kepala Desa dalam menjalankan perannya. Di mana kerja sama antara sesama suku itu tidak terlalu baik, mereka hanya bekerja sama antara satu wilayah atau sesama suku saja. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan penelitian Bapak Muh. Alwan bahwa:

“Di desa memiliki beberapa suku yang tentu juga memiliki perbedaan budaya. Oleh karenanya jika ada suatu kegiatan di salah satu suku maka hanya suku itu saja yang bekerja sedangkan suku yang lain tidak ikut serta, apalagi seperti ada pemisah antara tiap suku yakni wilayah dari masing-masing suku yang saling berjauhan dan di perparah lagi dengan kondisi jalan yang rusak apalagi ketika hujan, maka kondisi jalan akan semakin rusak sehingga sulit untuk Kepala Desa sendiri melakukan kegiatan kerja sama antara sesama suku”. (wawancara, 5 Juni 2019)
- b. Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi Kepala Desa. Karena masyarakat di Teteinea sulit ditemui dan dikumpulkan untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hanya mengutamakan pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Rahyulin bahwa:

“Masalah yang dihadapi Kepala Desa berkaitan dengan partisipasi masyarakat adalah ketika masyarakat diperintahkan untuk melakukan kerja bakti seperti di balai dan fasilitas umum lainnya, tidak ada masyarakat yang ikut berpartisipasi karena lebih sibuk dengan urusan pribadi mereka terlebih lagi sebagai masyarakat petani yang kesehariannya berada di kebun dari pagi hingga sore, sehingga Kepala Desa harus menggunakan tenaga kerja yang digaji untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan mereka lebih mengutamakan pekerjaan pribadi daripada kegiatan bersama”. (wawancara, 6 Juni 2019)

- c. Fasilitas dan peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap fasilitas dan peralatan yang ada akan membuat masyarakat tertarik dengan kegiatan pemberdayaan, sebaliknya jika fasilitas kurang memadai dan peralatan yang kurang tersedia akan menurunkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, Desa Teteinea masih kekurangan fasilitas dan peralatan dalam kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat, sehingga dalam menjalankan program pemberdayaan.

Berdasarkan pernyataan dari informan penelitian Bapak Suparlan Sarlan bahwa:

“Kepala Desa beserta aparatnya masih menggunakan barang pribadi dan peralatan seadanya yang bisa digunakan. Salah satu contohnya adalah komputer, sebagai alat pendukung kerja dalam pembuatan administrasi di desa, masih menggunakan komputer pribadi baik Kepala Desa maupun aparat desa. Tidak hanya bangunan yang kurang layak, tenaga teknis dalam bidang tertentu masih butuh pelatihan seperti pelatihan komputer, rancangan bangunan dan lain-lain”. (wawancara, 6 Juni 2019).

D. Kesimpulan

Bedasarkan uraian pada bagian tulisan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapatlah ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat secara umum sudah memberikan perubahan dan pembangunan serta pelatihan kepada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaannya sudah baik.
2. Adapun peranan Kepala Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang Kepala Desa dalam ketiga kategori tadi, namun di bagian perencanaan mendapat sedikit hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan program yaitu seperti hujan, kerusakan alat berat dan sedikit tenaga kerja yang menjadi kendala utama seperti pembuatan jalan tani dan drainase.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Teteinea ada 2 yaitu: a. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Ketiga faktor pendorong ini telah memberikan kemudahan bagi Kepala Desa dalam menjalankan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat. b. Faktor penghambat meliputi kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan peralatan atau fasilitas. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Teteinea, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Di mana kurangnya penduduk ketika diajak untuk kerja bakti dan kemajemukan suku menyebabkan kurangnya kerja sama antara suku yang satu dengan suku yang lain. Sehingga Kepala Desa sering mengalami kendala dalam menjalankan peranannya.

E. Referensi

- Abdullah. (2003). *Jalan Menuju Stabilitas, Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Adisasmata, R. (2006). *Paradigma dan Pendekatan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfabeta. W. (2003). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dahuri. et al. (2001). *Sumber daya pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ni'matul, H. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa. cetakan pertama*. Malang: Setara Press.
- Indrawijaya, A. (1984), *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha, T. (2005). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta.
- Prasadja, B. (1992). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali, Jakarta.
- Rakhmat, J. (1994). *Psikologis Komunikasi*. Remaja Karya: Bandung.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Suwignjo. (1993). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.